

STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK PADA RPJMN 2015-2019 DALAM MENDUKUNG SISTEM PERTAHANAN NEGARA

DEVELOPMENT STRATEGY OF PHYSICAL INFRASTRUCTURE IN THE 2015-2019 RPJMN IN SUPPORTING STATE DEFENSE SYSTEM

Ongky Harja Winata¹, Syaiful Anwar², Harangan Sitorus³

Program Studi Strategi Perang Semesta Universitas Pertahanan

(ongkyharjawinata@gmail.com)

Abstrak -- Pemerintah saat ini sedang melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik diberbagai daerah. Kegiatan pemerintah ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan melalui program prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang merupakan periode ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2004-2025. Pembangunan infrastruktur saat ini menjadi program prioritas dan memakan cukup banyak anggaran APBN diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* termasuk sektor pertahanan militer maupun nir-militer. Namun, pada proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik ini belum melibatkan Kementerian/Lembaga bidang pertahanan secara optimal. Sehingga, pembangunan yang dilaksanakan hanya bertujuan pada penyelesaian program kerja pada pemerintahan. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis strategi dan dampak pembangunan infrastruktur terhadap sektor pertahanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh dari informan yang sudah dipilih secara langsung berupa wawancara dan studi dokumentasi selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembangunan infrastruktur fisik belum mendukung sektor pertahanan. Sehingga dampak dari strategi pembangunan itu hanya terasa sebagian pada sektor pertahanan. Upaya yang perlu dilakukan dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi pembangunan infrastruktur fisik adalah dengan melibatkan Kementerian/Lembaga bidang Pertahanan secara aktif untuk memberikan kajian teknis terhadap pembangunan infrastruktur fisik yang mendukung sistem pertahanan negara secara militer dan nir-militer. Kesimpulan bahwa strategi pembangunan infrastruktur fisik berpengaruh terhadap upaya memberikan dukungan kekuatan pada sistem pertahanan negara.

Kata Kunci: strategi, pembangunan, infrastruktur, dan pertahanan negara

Abstract -- The government is currently carrying out accelerated development of physical infrastructure in various regions. This government activity is in accordance with what has been planned through priority programs in the National Medium Term Development Plan (RPJMN) for 2015-2019, which is the third period in the National Long Term Development Plan (RPJPN) for 2004-2025. Infrastructure development is currently a priority program and consuming a considerable amount of the APBN budget is expected to be able to provide a multiplier effect including both the military and non-military defense sectors. However, in the process of implementing physical

¹ Mahasiswa Strata 2 Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Tahun Akademik 2017-2018.

² Dosen Universitas Pertahanan.

³ Dosen Universitas Pertahanan.

infrastructure development, the defense sector Ministries / Institutions have not yet optimally involved. Thus, the development carried out only aims at the completion of work programs for the government. The purpose of this research is to analyze the strategy and the impact of infrastructure development on the defense sector. This study uses a qualitative method. Data obtained from informants who have been directly selected in the form of interviews and documentation studies are then analyzed by qualitative analysis techniques. The results of the study show that the physical infrastructure development strategy does not support the defense sector. So that the impact of the development strategy is only felt in part in the defense sector. Efforts that need to be made in the formulation and implementation of the strategy for developing physical infrastructure are involving the Ministry / Defense Agency in an effective manner to provide technical studies of the construction of physical infrastructure that supports the military and non-military defense systems. The conclusion that the strategy for developing physical infrastructure has an effect on efforts to provide strength support to the national defense system.

Keywords: strategy, development, infrastructure, and national defense

Pendahuluan

Dalam proses pembangunan di suatu negara, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu pemerintah harus mampu mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya, sehingga masyarakat akan merasa tenang, tenteram dan nyaman dalam menjalani kehidupannya sebagai warga suatu bangsa dan negara yang berdaulat dan merdeka. Agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan maksimal, pemerintah saat ini sudah merubah sistem pemerintahan dari yang “sentralistis” menjadi sistem pemerintahan “desentralistis” dalam bentuk daerah otonom dan pemberian wewenang otonomi daerah kepada

daerah-daerah provinsi yang ada di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, pemerintah memberikan kesempatan kepada daerah-daerah provinsi yang ada di seluruh wilayah Indonesia untuk dapat berkembang dan membangun daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat yang ada di daerah bersangkutan. Tanpa ada monopoli atau campur tangan dari pemerintah pusat yang terlalu jauh. Namun, tetap pembangunan tersebut harus menyesuaikan pada pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan apa yang telah disusun oleh pemerintah pusat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Pada program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia terdiri dari beberapa aspek penting, yaitu:

1. Ekonomi
2. Pengembangan Regional

3. Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
4. Sarana dan Prasarana
5. Pembangunan Manusia, masyarakat dan kebudayaan
6. Kependudukan dan Ketenagakerjaan
7. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
8. Pendanaan Pembangunan
9. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan⁴

Semua aspek pembangunan tersebut menjadi program yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah Indonesia saat ini. Salah satu proses tahap pembangunan yang gencar dikerjakan oleh pemerintah dan menjadi suatu prioritas utama dalam pelaksanaan program pembangunan pemerintah pada masa Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla mulai tahun 2014 adalah pembangunan infrastruktur.⁵

Ketersediaan infrastruktur fisik dijadikan sebagai prioritas pembangunan Indonesia saat ini karena merupakan

komponen penting untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur di Indonesia selama ini merupakan hambatan utama untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam peningkatan investasi serta menyebabkan mahal biaya logistik.⁶ Menjadi salah satu aspek pembangunan nasional, pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berjalan dengan baik dan berhasil akan mewujudkan kemakmuran rakyat dan tercipta pertahanan nasional yang kokoh dan kondusif. Salah satunya adalah ketersediaan sumber daya dengan parameter berupa ketersediaan (availability), keterjangkauan (affordability), kemudahan akses (accessability), serta penerimaan masyarakat dan lingkungan (acceptability).

Dengan ketersediaan infrastruktur yang beragam dan memadai, maka efisiensi lebih tercipta. Sektor riil akan lebih berpeluang tumbuh lebih besar karena para pelaku usaha kecil hingga besar sama-sama diuntungkan dengan biaya transportasi dan logistik yang lebih murah—dibandingkan jika infrastruktur kurang tersedia atau berkualitas buruk.

⁴ Lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019.

⁵ Dani Prabowo, *Pembangunan Infrastruktur untuk Siapa?*, dalam <https://properti.kompas.com/read/2018/05/11/223.000721/pembangunan-infrastruktur-untuk-siapa->, diunduh 20 Juni 2018.

⁶ Buku 1 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, 2014. Hal. 15

Oleh karena itu jalan tol masih relevan dan tetap dibutuhkan terutama untuk mempercepat konektivitas antar kota dalam sebuah pulau. Di tahun 2015 lalu semenjak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kala memimpin, menjadi prioritas utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) untuk memfokuskan diri untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pada proyek berupa pembangunan infrastruktur di bidang konektivitas kewilayahan berupa pembangunan jalan dan jembatan.

Pembangunan infrasturuktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan di Indonesia. Saat ini pemerintah memandang infrastruktur memegang peranan yang penting sebagai salah satu roda penggerak sektor ekonomi di Indonesia. Ini mengingatkan gerak laju dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Namun, paradigma berbeda di beberapa negara lain seperti Singapura, Jerman, Polandia dan Swiss yang menjadikan infrastruktur jalan raya menjadi landasan pacu yang secara khusus dibangun untuk bertindak sebagai

landasan pacu bagi sebagian besar pesawat militer dan berfungsi sebagai pangkalan udara militer tambahan. Landas pacu ini memungkinkan pesawat militer untuk terus beroperasi bahkan jika pangkalan udara reguler mereka dan beberapa target vital di negara itu terdegradasi atau hancur.

Selain itu, ada satu hal yang perlu diingat dalam proses membangun yakni memperhatikan ketimpangan antar wilayah. Jika terdapat sektor yang rasio tenaga kerja yang rendah maka tidak bisa dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur disitu, pemerintah mengutamakan yang indikator penyerapan tenaga kerjanya juga akan mengalami peningkatan setelah pembangunan infrastruktur. Pembangunan nasional dalam hal ini yang diprioritaskan pada program kerja Pemerintah adalah sektor infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tujuan sebagai komponen penopang kemandirian bangsa.

Kemandirian bangsa yang menjadi salah satu struktur untuk membentuk pertahanan negara pada hakikatnya adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban

seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu. Dalam menyelenggarakan pertahanan negara tersebut, bangsa Indonesia menganut sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman⁷.

Mengacu pada pandangan di atas, maka dalam rangka mendukung kekuatan dan kemampuan komponen pertahanan Indonesia, diperlukan pembinaan dalam pengelolaan dan pendayagunaan seluruh sumber daya nasional yang diarahkan sebagai potensi pertahanan guna mendukung terwujudnya kekuatan dan kemampuan komponen pertahanan negara dan unsur lain kekuatan bangsa yang mampu mengantisipasi setiap bentuk ancaman.

Dalam masa damai Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Buatan (SDB) serta Sarana Prasarana Nasional (SPN) yang dalam hal ini adalah infrastruktur berupa jalan dan jembatan memiliki fungsi utama yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep penyiapan komponen pendukung yang dilakukan harus dilakukan oleh pemerintah secara dini tersebut adalah dalam rangka pembangunan sistem pertahanan negara dan pemberdayaan potensi pertahanan yang diselenggarakan secara terpadu dengan menyinergikan fungsi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menata dan membina Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana Prasarana Nasional untuk disiapkan menjadi kekuatan pertahanan negara.

Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan rumusan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya. Alasan penulis menggunakan desain penelitian ini adalah dengan tujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan

⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi.

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan pedoman pertanyaan wawancara berupa daftar pertanyaan yang diajukan peneliti kepada para informan atau narasumber. Dokumentasi yang dilakukan melalui pengumpulan data pendukung seperti dokumen hasil rapat koordinasi, foto, diagram alur penentuan kebijakan atau referensi lain yang bisa digunakan. Studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh data melalui membaca dan mempelajari sejumlah literatur, buku, jurnal ilmiah, website internet, untuk menyusun kerangka teori yang menjadi dasar penelitian.

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung

dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari. Sedangkan kekurangan dari data primer adalah membutuhkan waktu yang relatif lama serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar.

Dalam hal ini, peneliti menggali sumber data primer dari para informan atau narasumber yang dipilih secara langsung atau *purposive sampling*, yaitu pejabat pada instansi pemerintahan di Kementerian Pertahanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan beberapa praktisi dan akademisi.

Selain sumber data primer, maka terdapat pula sumber data sekunder yang

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Kekurangan dari data sekunder adalah jika sumber data terjadi kesalahan, kadaluwarsa atau sudah tidak relevan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti menggali sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen yang mempunyai relevansinya dengan objek penelitian. Sedangkan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang merupakan langkah utama dari penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data.⁸ Tanpa mengetahui teknik

pengumpulan data, maka peneliti tidak dapat mendapatkan

data yang memenuhi standar data yang diharapkan. Dalam teknik pengumpulan data yang dibutuhkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Setelah data yang dibutuhkan diperoleh maka data kemudian dianalisis dihadapkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Lalu langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flow chart dan sejenisnya dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

Dalam penyusunan instrumen penelitian, dilakukan *coding* atau pelaksanaan kisi-kisi sesuai dengan instrumen yang sudah ditentukan untuk memberikan panduan yang jelas kepada peneliti dalam melakukan penelitian supaya tidak keluar dari apa yang diharapkan pada proses pengambilan sumber data. Untuk lebih jelas jabaran mengenai *instrument coding* atau kisi-kisi instrumen dijabarkan dalam tabel berikut ini:

⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. (Jakarta:

Alfaveta, 2016). Hlm. 308

Tabel 1. Kisi Kisi Instrumen Penelitian

No	Komponen	Aspek Yang Diteliti	Sub Aspek	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Kode Hasil
1	STRATEGI	<i>Ends</i> (Tujuan): tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik	Visi dan misi pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik	Bappenas KPPIP	Wawancara Dokumentasi	1A.a
			Tujuan pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik	Bappenas KPPIP	Wawancara Dokumentasi	1A.b
		<i>Ways</i> (Cara): proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur	Perencanaan dan persiapan pembangunan infrastruktur	Bappenas KPPIP PUPR Kemhan	Wawancara Dokumentasi	1B.a
			Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga	Bappenas KPPIP PUPR Kemhan	Wawancara Dokumentasi	1B.b
		<i>Means</i> (Sarana): sarana dan prasarana pelaksanaan pembangunan infrastruktur	Sumber daya manusia	PUPR Kemhan	Wawancara Dokumentasi	1C.a
			Dukungan anggaran	Bappenas KPPIP PUPR Kemhan	Wawancara Dokumentasi	1C.b
2	DAMPAK	<i>Input</i> (Masukan): implementasi strategi K/L didukung dengan kontribusi sektor terkait pada pembangunan infrastruktur	Implementasi strategi	Bappenas KPPIP PUPR Kemhan	Wawancara Dokumentasi	2A.a
			Kontribusi sektor terkait	Bappenas KPPIP PUPR Kemhan	Wawancara Dokumentasi	2A.b
			Kendala pada implementasi strategi	Bappenas KPPIP	Wawancara Dokumentasi	2A.c
		<i>Output</i> (Keluaran): hasil implementasi strategi pembangunan infrastruktur	Ketersediaan infrastruktur	PUPR Kemhan	Wawancara Dokumentasi	2B.a
			Mutu infrastruktur yang mampu menunjang sektor pertahanan	PUPR Kemhan	Wawancara Dokumentasi	2B.b
		<i>Outcome</i> (Manfaat): manfaat pembangunan infrastruktur	Manfaat pembangunan	Bappenas KPPIP	Wawancara Dokumentasi	2C.a

No	Komponen	Aspek Yang Diteliti	Sub Aspek	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Kode Hasil
		pada sektor pertahanan militer dan nirmiliter	infrastruktur kepada sektor pertahanan militer	PUPR Kemhan		
			Manfaat pembangunan infrastruktur kepada sektor pertahanan nirmiliter	Bappenas KPPIP PUPR Kemhan	Wawancara Dokumentasi	2C.b

Sumber: Diolah Peneliti di Jakarta pada tahun 2018

Hasil Dan Pembahasan

Sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini dan dijelaskan pada bab sebelumnya, komponen yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari komponen strategi yang terdiri dari ends (tujuan), ways (cara), dan means (sarana) serta komponen dampak yang terdiri dari input (masukan), output (keluaran/hasil), dan outcome (akibat).

Strategi Pembangunan Infrastruktur Fisik

Dari hasil penelitian yang dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kisi-kisi instrumen penelitian pada komponen strategi, dirangkum dalam tabel ringkasan dibawah ini:

Tabel 2. Ringkasan Hasil Temuan Komponen Strategi Pembangunan Infrastruktur Fisik

Kode Hasil	Aspek	Ringkasan Hasil Temuan
Ends (Tujuan): tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik		
1A.a	Visi dan misi pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik	Visi dan misi pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik dari Kementerian PUPR dan KPPIP secara umum sudah mengacu pada arah RPJP yang penerapannya saat ini disesuaikan pada RPJMN 2015-2019, yaitu peningkatan sektor perekonomian.
1A.b	Tujuan pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik	Tujuan pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik saat ini secara umum sesuai dengan RPJMN 2015-2019.
Ways (Cara): proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur		
1B.a	Perencanaan dan persiapan pembangunan infrastruktur	Perencanaan dan persiapan pembangunan infrastruktur sudah mengacu pada tahapan perencanaan Bappenas dan Kementerian PUPR
1B.b	Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga	Koordinasi antar Kementerian Pertahanan dengan pemilik proyek infrastruktur masih belum maksimal. Salah satu

Kode Hasil	Aspek	Ringkasan Hasil Temuan
		penyebabnya belum adanya payung hukum secara konstitusional yang lebih detai untuk mengatur bahwa infrastruktur harus menunjang sektor pertahanan dan keamanan.
Means (Sarana): sarana dan prasarana pelaksanaan pembangunan infrastruktur		
1C.a	Sumber daya manusia	Untuk pelaksanaan proyek dilapangan secara jumlah sudah memadai, namun secara kualitas belum memadai. Dalam segi perumusan kebijakan belum adanya kesadaran dan pengetahuan yang cukup mengenai pentingnya elemen pertahanan dalam pembangunan infrastruktur.
1C.b	Dukungan anggaran	Secara umum sudah terselenggara dengan baik dengan adanya pagu anggaran dari APBN dan pinjaman hutang luar negeri.

Sumber: Diolah Peneliti di Jakarta pada tahun 2018

Hipotesis Strategi Pembangunan Infrastruktur Fisik

Secara umum proses pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan sesuai dengan penelitian ini adalah menggambarkan bahwa awal mula pembangunan selalu diawali dengan adanya ide gagasan untuk membangun, selanjutnya ide ini dituangkan ke dalam konsep pembangunan. Berdasarkan konsep pembangunan dijabarkan ke dalam program pembangunan. Setelah program pembangunan di buat barulah dilaksanakan. Dalam proses pelaksanaan dilakukan monitoring dan pengawasan pembangunan untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan sudah sesuai dengan program yang ada. Sesudah pembangunan selesai dilakukan evaluasi, apakah hasil pembangunan yang telah

direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang diharapkan tercapai, terhambat atau gagal.

Pembangunan segenap komponen utama dan pendukung pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan lebih terarah dan terpadu dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Secara sistematis dan terencana pembangunan komponen utama dan pendukung pertahanan dan keamanan negara diawali dengan penyusunan dan penyempurnaan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran dari Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Selanjutnya peraturan perundang-undangan tersebut telah diikuti dengan pembenahan kelembagaan maupun personil di Kementerian atau Lembaga

sesuai dengan aspirasi rakyat secara konstitusional.

Penyesuaian strategi pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya dengan sasaran program untuk mewujudkan sektor pertahanan TNI yang profesional sebagai komponen utama fungsi pertahanan negara yang mampu menghadapi setiap ancaman terhadap kedaulatan dan integritas bangsa sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Arah kebijakan program pembangunan infrastruktur sesuai dengan RPJMN 2015-2019 belum mencapai dukungan untuk mempertahankan kemampuan dan kekuatan TNI serta menyempurnakan sistem pemeliharaan termasuk sistem pendukungnya (infrastruktur) untuk menciptakan wilayah pertahanan dengan infrastruktur yang sesuai dengan kajian teknis pertahanan guna mempertahankan kemampuan operasional alat utama sistem senjata (alutsista) yang ada sehingga dapat diwujudkan kemampuan yang utuh dan handal.

Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan telah menunjukkan kemajuan meskipun masih mengandung berbagai kelemahan. Berbagai permasalahan keamanan yang dihadapi saat ini belum dapat diatasi secara cepat

dan tepat oleh pemerintah. Sementara itu kondisi perekonomian yang masih kurang menguntungkan, mengakibatkan masyarakat semakin rentan terhadap isu-isu yang berkembang, sehingga kondisi ini semakin mempermudah timbulnya konflik vertikal maupun horisontal yang berpotensi mengancam integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga memerlukan penanganan yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai komponen terkait.

Dengan demikian, hasil penelitian yang dituangkan dalam tabel ringkasan temuan diatas yang kemudian dianalisis dengan teori yang relevan, terdapat kesimpulan sementara strategi pembangunan infrastruktur fisik di Indonesia dilihat dari aspek tujuan, cara dan sarannya sudah sesuai dengan harapan dan mengacu pada RPJMN 2015-2019. Dengan pola-pola tahapan perencanaan sampai dengan pembangunannya. Namun, strategi tersebut hanyalah strategi yang wajar dilaksanakan pada proses pembangunan dan belum menyesuaikan dengan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

“Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber

daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.”⁹

Dikarenakan belum adanya melibatkan secara integratif dalam tahapan perencanaan dan pembangunan sampai evaluasi pada proses pembangunan infrastruktur oleh K/L terkait dengan lembaga pertahanan seperti Kementerian Pertahanan dan TNI.

Dampak Implementasi Strategi Pembangunan Infrastruktur Fisik

Dari hasil penelitian yang dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kisi-kisi instrumen penelitian pada komponen dampak, dirangkum dalam tabel berikutnya ini.

Hipotesis Dampak Implementasi Strategi Pembangunan Infrastruktur Fisik

Dampak dari infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi baru akan terasa ketika infrastruktur tersebut sudah beroperasi. Tentunya ada dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi selama infrastruktur dibangun, tapi belum

optimal. Pembangunan infrastruktur memang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi *supply*. Namun, setidaknya ada hal-hal yang mesti diperhatikan. Pembangunan infrastruktur saat ini cenderung relatif padat modal dibandingkan di masa lalu dengan skema model pinjaman dari negara China yang mudah, membuat pemerintah Indonesia saat ini melaksanakan kebijakan pembangunan yang prosesnya dipercepat.

Pembangunan infrastruktur memang tidak bisa memberi hasil instan. Menurut dia ada time lag agak panjang, setidaknya tiga hingga lima tahun ke depan. “Dalam jangka pendek, pembangunannya menyerap tenaga kerja, sedangkan dalam jangka menengah dan panjang, bisa meningkatkan konektivitas, memangkas biaya logistik, dan menaikkan efisiensi yang ditandai dengan penurunan incremental capital-output ratio (ICOR).¹⁰

Dampak dari strategi pembangunan infrastruktur pada sektor pertahanan yang sekarang ini dilaksanakan oleh pemerintah menuai unsur yang mendukung pertahanan dan kurang mendukung. Dalam pertahanan nir-militer akan menciptakan pertumbuhan ekonomi

⁹ UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 1 No. 2

¹⁰ Prasetyantono, Tony.

sesuai dengan data BI dari tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 5,02% ke 5,07% yang di generate oleh sektor pembangunan infrastruktur. Walaupun masih kecil dan dibawah target, namun ini akan semakin meningkat mengingat

pekerjaan infrastruktur yang dibangun belum semuanya selesai dan beroperasi. Artinya, pertahanan di sektor ekonomi pada pertumbuhan ekonomi sudah diberikan dampaknya oleh pembangunan infrastruktur.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Temuan Komponen Dampak Implementasi Strategi Pembangunan Infrastruktur Fisik

Kode Hasil	Aspek	Ringkasan Hasil Temuan
Input (Masukan): hasil implementasi strategi pada pembangunan infrastruktur		
2A.a	Implementasi strategi	Beberapa pekerjaan proyek infrastruktur yang dikerjakan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Palembang, penerapan strategi pembangunan infrastruktur fisik yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi, saat ini memiliki fokus tujuan untuk memindahkan orang dari satu titik ke titik lain.
2A.b	Kontribusi sektor terkait	Kontribusi dari beberapa pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan sudah ada baik secara kebijakan, maupun action dilapangan. Namun, masih kurang optimal dalam mendukung sistem pertahanan.
2A.c	Kendala pada implementasi strategi	Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan strategi pembangunan infrastruktur adalah koordinasi, komunikasi, kesediaan lahan, dan pendanaan. Dan kaitannya dengan proses untuk mendukung sistem pertahanan, K/L diluar sektor pertahanan masih berfokus pada sektornya masing-masing dan belum terlaksananya mediasi dan sosialisasi yang melibatkan K/L bidang pertahanan.
Output (Keluaran): hasil implementasi strategi pembangunan infrastruktur		
2B.a	Ketersediaan infrastruktur	Sudah terpenuhi sebagian sesuai dengan RPJMN 2015-2019
2B.c	Mutu infrasruktur yang mampu menunjang sektor pertahanan	Belum ada kajian mutu infrastruktur secara teknis yang menunjang sektor pertahanan
Outcome (Manfaat): manfaat pembangunan insfrastruktur pada sektor pertahanan militer dan nirmiliter		
2A.a	Manfaat pembangunan infrastruktur kepada sektor pertahanan militer	Belum memberikan manfaat yang sesuai dengan sektor pertahanan militer karena belum adanya pengawasan secara langsung oleh Kementereian Pertahanan dan TNI dalam penyusunan rencana serta pelaksanaan pekerjaan proyek infrastruktur
2A.b	Manfaat pembangunan infrastruktur kepada sektor pertahanan nirmiliter	Terdapat manfaat yang besar pada pertahanan nir-militer dimana pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai kekuatan pada kekuatan pertahanan bidang ekonomi

Sumber: Diolah Peneliti di Jakarta pada tahun 2018

Namun, hal ini juga bisa menuai potensi ancaman ketika kita mengingat bukan 100% pembiayaan pembangunan infrastruktur menggunakan dana APBN tapi menggunakan dana ULN (Utang Luar Negeri). Dengan dengan kata lain faktor kondisi pertahanan dan keamanan dalam negeri perlu dijaga agar kegiatan perekonomian dan investasi di Indonesia juga berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan pada proses pengembalian utang yang berdampak pada kedaulatan NKRI.

Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang dihadapkan pada teori serta pendapat pakar sebagai pisau analisis pada bab sebelumnya, didapatkan kesimpulan kecil dari masing-masing aspek yang diteliti. Lalu dirangkum menjadi kesimpulan besar pada bab ini untuk menjawab pertanyaan penelitian sesuai dengan hal yang diangkat pada penelitian ini. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini, diantara lain adalah:

1. Strategi pembangunan infrastruktur fisik yang saat ini dilaksanakan pemerintah dalam bentuk pekerjaan percepatan, memiliki tujuan yang sudah mengacu pada

program-program dalam dokumen RPJMN 2015-2019 dan sudah sesuai dengan harapan. Namun, ditinjau dari sudut pandang Sistem Pertahanan Negara, strategi pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya mendukung sistem pertahanan negara dan hanya bisa mendukung pertahanan nir-militer saja. Yaitu, dalam rangka pembentukan sarana prasarana pertahanan untuk menghadapi perang ekonomi. Secara umum cara dari bagian strategi ini mulai dari perencanaan, persiapan dan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait sudah sesuai dengan harapan. Dan pada prosesnya, pelaksanaan strategi pembangunan infrastruktur di Indonesia kurang melibatkan sektor pertahanan seperti Kementerian Pertahanan dan TNI. Sehingga infrastruktur terbangun saat ini hanya men"generate" pertumbuhan ekonomi saja serta memenuhi peran politik pemerintah dalam pembangunan. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara umum sudah sesuai dengan harapan, yaitu dengan penggunaan APBN. Ada yang menjadi perhatian khusus pada pemakaian

anggaran diluar APBN pada pembangunan infrastruktur berupa bantuan dari negara lain dapat menjadi potensi ancaman bagi negara Indonesia dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Serta sumber daya manusia pada level perumus kebijakan maupun pelaksana yang belum optimal mengenai pentingnya sektor pertahanan dalam proses pembangunan ifrastruktur fisik.

2. Dampak implementasi strategi pembangunan infrastruktur menjadi masukan (input) bagi dampak dalam proses pemenuhan kebutuhan pertahanan negara yang bersifat militer dan nir-militer. Karena kurang adanya pelaksanaan pembangunan yang holistik dan terintegrasi antar kementerian atau lembaga pemilik proyek dengan sektor pertahanan seperti Kementerian Pertahanan dan TNI, maka sejauh ini masukan yang dapat diterima dari pembangunan infrastruktur adalah pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan pertahanan nir-militer. Ketersediaan infrastruktur saat ini sudah sesuai dengan harapan dan target dari dokumen perencanaan RPJMN 2015-2019. Namun, jika dilihat dari mutu infrastruktur yang menjadi keluaran

(output) yang dihasilkan dihadapkan pada sistem pertahanan negara, belum menjamin secara kekuatan untuk menunjang sektor pertahanan karena belum adanya peran pengawasan dari segi perencanaan dan pembangunan dari kementerian/lembaga bidang pertahanan seperti Kementerian Pertahanan, TNI, maupun swasta terkait dengan mutu infrastruktur yang menunjang pertahanan militer. Sehingga manfaat (output) yang didapatkan dari pembangunan infrastuktur pada sektor pertahanan belum sepenuhnya terpenuhi, hanya sektor pertahanan nir-militer yang menunjang pertumbuhan ekonomi untuk pertahanan ancaman non militer berupa ancaman ekonomi.

Saran dan Rekomendasi

Sesuai dengan hasil penelitian, pembahasan hasil, dan kesimpulan yang didapat dari penelitian ini serta dihadapkan pada teori, konsep dan pendapat pakar yang diangkat sesuai dengan bidang pertahanan, maka peneliti mengusulkan masukan berupa rekomendasi supaya penelitian ini mendukung kajian akademis untuk dilaksanakannya beberapa program berupa kebijakan maupun pelaksanaan di

sektor pemerintahan dan non pemerintahan. Adapun yang menjadi rekomendasi dari penelitian ini adalah:

1. Perlunya kajian lebih lanjut dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kerja pembangunan infrastruktur pada kementerian pemilik proyek dengan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk mewujudkan infrastruktur yang mendukung sistem pertahanan negara pada sektor militer dan nir-militer.
2. Serta dalam hal ini, Kementerian Pertahanan juga perlu memberikan sosialisasi yang mendalam dengan dokumen pedoman strategi pertahanan yang bukan hanya ditujukan pada pelaksana bidang pertahanan saja untuk menunjang pertahanan pada perencanaan dan pembangunan infrastruktur fisik prioritas.
3. Penyusunan RTRW Pertahanan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI untuk melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait sehingga tercipta sinkronisasi pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah di Indonesia yang memang nantinya dapat dijadikan sarana dan prasarana Sumber Daya Nasional bagi komponen pendukung sistem pertahanan negara Indonesia yang bersifat kesemestaan bukan hanya di wilayah perbatasan saja.
4. Adanya payung hukum yang kuat seperti pengesahan Rancangan Undang-Undang Komcad dan Komduk yang nantinya dapat dijadikan dasar oleh Kementerian Pertahanan dalam upaya pembangunan infrastruktur yang holistik atau berkesinambungan dengan konsep pertahanan militer dan nir-militer.
5. Perlu kajian khusus secara teknis pada pelaksana proyek infrastruktur yang mengedepankan proses percepatan untuk lebih jeli melihat kondisi lingkungan strategis yang terjadi tentunya hal itu didapat dari masukan dan kajian Kementerian Pertahanan, TNI atau lembaga lain bidang Pertahanan.
6. Perlu dilakukan optimalisasi pendekatan top-down yang dapat diwujudkan melalui Kerja Kelompok atau group work dan Pengambilan Keputusan Kelompok (group decision-making) melibatkan instansi-instansi teknis terkait. Dalam hal ini, proses penggalan informasi, sintesa informasi, dan analisa permasalahan sampai dengan pembahasan alternatif solusi secara efektif dan kolaboratif

untuk mendapatkan pemahaman kompleksitas masalah, penyatuan perspektif yang beragam, dan pemilihan solusi secara kolektif dan terpadu dapat difasilitasi dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) secara kolaboratif yang merupakan penggabungan peta rencana pembangunan dari masing-masing Kementerian dan Lembaga, sehingga program pembangunan infrastruktur yang diajukan mampu diterima oleh semua pihak termasuk pertahanan.

Sementara itu, terkait pendekatan *bottom-up*, perlu dibangun metode penyaluran aspirasi kelompok masyarakat pengguna maupun kelompok masyarakat yang akan terkena dampak suatu kegiatan pembangunan infrastruktur yang menunjang pertahanan melalui penerapan SIG atau pemetaan partisipatif atau dikenal juga sebagai SIG partisipasi publik.

Daftar Pustaka

Referensi Buku

Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Ekonomi Tata Ruang Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik. Bandung* : Pustaka Setia. Jakarta.

Anonim, 2012. National Institute of Standard and Technology. Joint Task Force Transformation Initiative.

Anwar, Syaiful. 2016. *Melindungi Negara*. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia.

Arikunto. Suharsimi. 2013. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta. Jakarta

Badan Koordinasi Penanaman Modal Press. 2015. *Peluang Investasi 19 Provinsi (Profil Indonesia)*. Jakarta.

Buku Putih Pertahanan Negara Indonesia. 2015. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Buzan, Barry. 1991. *People States and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*. Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf.

Craswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada University press.

Eriyatno. 2011. *Membangun Ekonomi Komparatif: Strategi Meningkatkan Kemakmuran Nusa dan Resiliensi Bangsa*. Jakarta: Gramedia.

Hutagaol, David. 2017. "Evaluasi Program Perumusan Dokumen Kebijakan Strategis Pertahanan Negara (Studi Di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia)". *Tesis Magister: Universitas Pertahanan*.

Idrawan, Jerry. 2015. *Studi Srategis dan Keamanan*. Depok: Nadi Pustaka.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media.

Larasati, Dinda Annissa. 2017. "Benefit-Cost Analysis Dalam Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian Angkutan Batubara (Studi Kasus : Kalimantan Timur)". *Tesis Magister: Universitas Pertahanan*.

- Lazuardi, Ahmad Lintang et al. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan: John Creswell*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Midhio, I Wayan, at al. 2017. *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Universitas Pertahanan*. Bogor: Universitas Pertahanan Press.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)*. Edisi Ketiga. Penerbit PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
- Prabowo, Johannes Suryo. 2012. *TNI dalam Menyikapi Perubahan Lingkungan Strategis*. Jakarta: Gramedia.
- Purwanto, Erwan Agus; Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Stephen Covey, 1989. *7 Habits of Highly Effective People*.
- Referensi Tesis/Disertasi**
- Dunn, William. *Public Policy Analysis*. New Jersey: Pearson Education.
- Fandeli, 2004. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan: Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hartanto, 1996. *Kepemimpinan Sinergetik: Membangun Keunggulan Melalui Kerjasama dan Aliansi Strategik*.
- Munir, B, 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. NTB: Badan Penerbit Bappeda.
- Quingley, 1993. *A Culture of Synergy*.
- Rangkuti, Freddy. 1998. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus*.
- Saputra, Arvin; Greene, Robert. 2007. *33 Strategi Perang*. Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Saputra, Sugiarso Mulia. 2016. "Evaluasi Infrastruktur Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia dalam Menghadapi AFTA". *Tesis Magister: Universitas Pertahanan*.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik Bagian Pertama Edisi Revisi Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance: Kepemimpinan yang Baik Bagian Kedua Edisi Revisi Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance: Kepemimpinan yang Baik dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagian Ketiga Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Senge, 1996. *The Synergy of Learning Organisations*.
- Soekanto, Soerjono. 1999. *Metodologi Reseach Jilid 1*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soemarwoto, O, 2001. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Soewarso; Soeharto dan Nyoman Mastra. 1984. *Wawasan Nusantara Ketahanan Nasional Keamanan Nasional*. Jakarta: Ganep Jaya.

- Sondang, Siagian. 1978. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Gita Karya.
- Subarsono, 2008. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang: Widya Karya
- Suprayitno, Makmur. 2016. *Tentang Perang Terjemahan Buku I, II, dan Buku III dari "On War" Carl Von Clausewitz*. Jakarta: Makmur Cahaya Ilmu.
- Supriyatno, Makmur. 2014. *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Susanti, Elva. 2016. "Pembangunan Infrastruktur Keamanan Pelabuhan Batu Ampar Batam dalam Mendukung Ekonomi Maritim". *Tesis Magister: Universitas Pertahanan*.
- Sutryokusumo, Suryanto. 2016. *Konsep Sistem Pertahanan Nonmiliter: Suatu Sistem Pertahanan Komplemen Sistem Pertahanan Militer dalam Pertahanan Rakyat Semesta*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Usman, Husaini. & Setiady Akbar, Purnomo. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wardhana, W.A., 2001. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Caps.

Referensi Jurnal

- Branch, Melville, C, 1996. *Perencanaan Kota Komprehensif Pengantar dan Penjelasan*. edisi terjemahan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn. 1984. "Policy Analysis for the Real World". Oxford: Oxford University Press.
- Crescenzi dan Pose. 2012. "Infrastructure and regional growth in the European Union", London: London Scholl of Economics.
- Crevelde, Martin van. 1977. "Supplying War: Logistics from Wallenstein to Patton", Cambridge: Cambridge University Press.
- Gropman, Alan. 1997. "The big 'L' : American logistics in World War II". *Defense Jurnal*. Washington DC: National Defense University Press.
- Ikuo Kabashima dan Lynn T. White III (ed), 1986. "Political System and Change". New Jersey: Princeton University Press.
- Joel S. Migdal, 1988. "Strong Societies and Weak States: State-society Relations and State Capabilities in the Third World". New Jersey: Princeton University Press.
- Kuncoro, M, 2003. "Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan". Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mankiw, G.N., Romer, D., Weil, D.N., 1992. "A contribution to the empirics of economic growth". *Quarterly Journal of Economics*.

Mochtar Mas'hoed dan Colin MacAndrews, 2001. "Perbandingan Sistem Politik" Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001)

Stewart, James. 2015. "Give the economic benefits of infrastructure a chance to breathe", UK: The Guardian.

Welch, David. 2000. "Germany, Propaganda and Total War", New Jersey: Rutgers University Press.

Referensi Undang-Undang

Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Referensi Peraturan

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

Referensi Internet Online

Anonymus, dalam <http://www.evaluatingimpactinvesting.org/syllabus/theory-of-change/>, diunduh 1 September 2018

Aprinita Hapsari, Pergeseran Penyediaan Barang Publik dari Pemerintah ke Swasta, dalam <https://www.kompasiana.com/aprinitadh/58568350d49273fe2b51b5bb/penyediaan-barang-publik-dari-pemerintah-ke-swasta>, diunduh 20 Mei 2018.

Prabowo, Dani. 2018. Pembangunan Infrastruktur untuk Siapa?, dalam <https://properti.kompas.com/read/2018/05/11/223000721/pembangunan-infrastruktur-untuk-siapa->, diunduh 20 Juni 2018.

Zuraya, Nidia. 2017. Tak Bisa Bayar Utang, Sri Lanka Lepas Pelabuhan ke Cina, dalam <https://republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/17/07/31/otxms8383-tak-bisa-bayar-utang-sri-lanka-lepas-pelabuhan-ke-cina>, diunduh 20 Juni 2018. 1 September 2018.